



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Irwan Ardiansyah

221003742019051

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
IRWAN ARDIANSYAH
NPM : 221003742019051

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

DR. MARKUS SURYO UTOMO, SH.MSI
NUPTK : 2339742643130073

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, Pidanaaan	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana.....	17
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	19
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
5. Pidanaaan	23
B. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika.....	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Tindak Pidana Narkotika	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Sumber Data	32

D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.....	36
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum, Khususnya Hakim Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba sebagai *extraordinary crime* menunjukkan peningkatan dengan penindakan Polri sebesar 10,76% pada semester pertama 2025, yang didukung data empiris Riset Nasional Prevalensi BNN dan BRIN. Kondisi ini menempatkan pengadilan sebagai ujung tombak krusial dalam menerapkan sanksi pidana yang adil di tengah target prevalensi nasional. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2025/PN Kendal untuk melihat respons hakim terhadap kebijakan sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses pelaksanaan sanksi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memahami proses penanganan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Kendal, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data melalui pendekatan normatif-kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam perkara tersebut didasarkan pada pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Majelis Hakim memilih Pasal 112 ayat (1) karena unsur penguasaan narkoba terbukti paling kuat dibandingkan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1). Kendala yang dihadapi hakim meliputi kesulitan pembuktian dalam membedakan peran pengguna dan pengedar, keterbatasan diskresi akibat ketentuan pidana minimum, serta dilema antara pendekatan represif dan rehabilitatif dalam pemidanaan.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana, Narkoba.